

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses yang menitikberatkan pada perwujudan perekonomian yang semakin baik dan bertujuan untuk memakmurkan masyarakat dengan cara pengembangan perekonomian dapat disebut dengan pembangunan. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu dari bentuk masalah sosial yang ada. Munculnya kemiskinan sebagai akibat adanya kesalahan dalam proses kehidupan sosial.² Kemiskinan merupakan bentuk masalah sosial, sehingga harus diatasi. Munculnya kemiskinan akan berdampak pada tidak berkembangnya perekonomian, karena kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat melaksanakan kehidupannya dengan baik.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang meliputi hidup secara keseluruhan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seseorang atau lebih. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan dan juga ketimpangan dalam masyarakat. Kemiskinan secara umum merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 107-108

³ Mohammad Rokib, *Teologi Bencana: Studi Santri Tanggap Bencana*, (Yogyakarta: Pital, 2013), hal. 92

Istilah kemiskinan muncul ketika keadaan dimana seseorang ataupun lebih tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran yang dianggap dengan standar kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Kemiskinan untuk sekarang ini merupakan masalah yang penting, sehingga dibutuhkanlah campur tangan dari pemerintah, karena dalam ekonomi kemiskinan adalah suatu permasalahan yang utama yang harus dientaskan. Aspek yang mengarah pada kehidupan masyarakat serta harus dilakukan secara beriringan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dengan mengarah kepada ruang lingkup yang lebih luas.

Kemiskinan merupakan salah satu dalam permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Kemiskinan dapat menghambat pemerataan wilayah, pembangunan wilayah, dan demokrasi ekonomi, sehingga kemiskinan perlu menjadi perhatian utama dalam pengentasannya melalui pembangunan nasional dan pembangunan wilayah.⁴ Perencanaan pembangunan dalam analisis ekonomi terdapat dua dimensi yang harus dipahami, yaitu dimensi wilayah (regional) dan spasial (tata ruang).⁵

Kemiskinan yang berkaitan dengan wilayah maupun spasial ditunjukkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Lestia, dan Sukmawaty yang menjelaskan bahwasannya kemiskinan ditandai dengan masyarakat miskin yang mengelompok pada wilayah tertentu, sehingga terdapat kemiskinan yang dipandang sebagai fenomena keheterogenan spasial.

⁴Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal. 163

⁵*Ibid.*, hal. 3

Kemiskinan sering disebabkan oleh faktor spasial dan keragaman geografis. Penelitian Susanti, Lestia, dan Sukmawaty dengan dimasukkannya faktor geografis menunjukkan hasil bahwa secara spasial yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, dan persentase balita kekurangan gizi.⁶

Permasalahan kemiskinan yang terdapat di suatu daerah ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berarti ketidakcukupan dalam kehidupan seseorang ataupun sekelompok orang. Ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ad-Duha ayat 8 yaitu:⁷

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Artinya:

Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

Al-Qur'an Surat Ad-Duha ayat 8 memberikan gambaran bahwa apabila seseorang dalam kehidupan yang kekurangan (miskin) akan tetapi masih memiliki banyak tanggungan maka akan memperoleh rezeki sehingga akan meningkatkan taraf kecukupan. Ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan akan menjadi fokus utama bagi permasalahan perekonomian, sehingga perlunya cara yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.

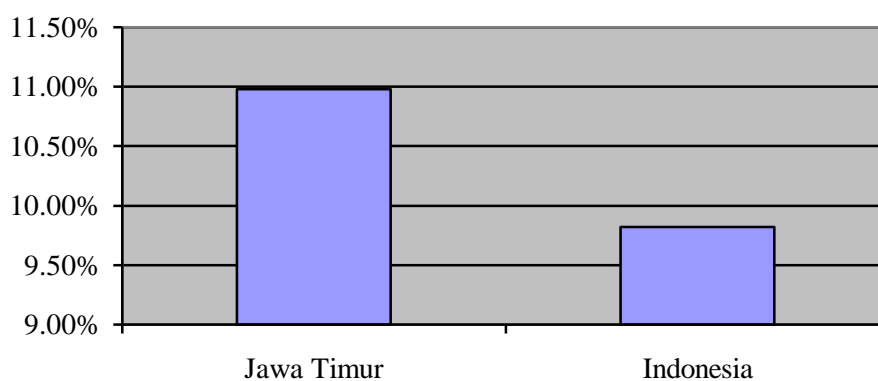
⁶Dewi Sri Susanti, dkk, "Pemodelan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Propinsi Kalimantan Selatan dengan Pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR)", *Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016*, Oktober 2016, hal. 184-191

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 596

Permasalahan kemiskinan apabila dibiarkan maka dalam jangka panjang akan berdampak kemunduran atau kehancuran umat manusia.

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik masih cenderung tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di Indonesia, berikut adalah perbandingan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia:

Gambar 1.1
Perbandingan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia
Tahun 2018



Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang masih cenderung tinggi dibandingkan Indonesia, berdasarkan lampiran 1 (persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia Tahun 2018) terlihat bahwa tingginya kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ditandai dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 10.98, sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 9,82, artinya pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur berada diatas persentase kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satu penyebab kemiskinan masih terdapat orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau biasa disebut dengan pengangguran. Pengangguran di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam publikasi tahunannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Kelompok Umur	Jumlah
15-19	200.606
20-24	275.014
25-29	111.198
30-34	62.787
35-44	53.723
45-49	39.262
50-54	29.403
55-59	40.273
60-64	17.130
65+	20.278
Total	850.474

Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jatim masih adanya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Jumlah pengangguran secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 850.474. Data ini menunjukkan bahwa masih adanya jumlah pengangguran dan dengan adanya pengangguran perlunya perhatian untuk menurunkan angka pengangguran secara umum.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, karena tenaga kerja yang terserap oleh lapangan

pekerjaan di daerah akan mampu menggerakkan perekonomian. Tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan, karena salah satu unsur dari kesejahteraan adalah pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan yang layak, sehingga adanya suatu keharusan seseorang untuk bekerja agar mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39:⁸

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.

Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39 memberikan penekanan terhadap pekerjaan dan menjelaskan bahwa manusia di bumi diciptakan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan masing-masing. Bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan.⁹ Pendapatan yang diterima oleh orang yang bekerja diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tenaga kerja, sehingga dengan adanya tenaga kerja yang terserap maka akan mengurangi kemiskinan.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 527

⁹Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal 211

Tenaga kerja dengan kemiskinan mempunyai hubungan seperti teori yang telah disebutkan oleh Pascual dalam penelitian Ratih, Utama, dan Yasa, bahwasannya kemiskinan yang terjadi dapat diturunkan dengan cara peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai modal dalam pembangunan daerah.¹⁰ Penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati tentang kemiskinan menunjukkan bahwa hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah tenaga kerja mempunyai pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Tenaga kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan berarti kenaikan tenaga kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, begitupun sebaliknya.¹¹

Tenaga kerja adalah salah satu permasalahan yang mempunyai hubungan dengan kemiskinan, tetapi masih terdapat hal lain yang harus diperhatikan dalam kemiskinan yaitu pengangguran. Pengangguran dapat menimbulkan permasalahan kemiskinan, karena adanya pengangguran yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang menimbulkan sulitnya untuk memenuhi hidupnya yang dikarenakan orang yang menganggur tidak mendapatkan upah. Pengangguran adalah keadaan seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan dan termasuk dalam angkatan kerja, akan tetapi belum mendapatkannya.

¹⁰ Gusti Ayu Putra Ambara Ratih, dkk, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 36

¹¹ Daftian Tri Prasetyawan, dkk, "Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ekuilibrium*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 49

Masalah pengangguran merupakan masalah dari makro ekonomi, karena dengan adanya pengangguran, maka masyarakat tidak mampu untuk mencapai tingkat kemakmuran. Keadaan seseorang yang tidak bekerja sama sekali, akan tetapi masih terus berusaha untuk mencari pekerjaan dinamakan dengan pengangguran terbuka. Penyebab dari adanya pengangguran terbuka adalah tidak adanya lapangan pekerjaan yang cocok antara latar belakang pendidikan dan kesempatan kerja sehingga menimbulkan seseorang untuk tidak mau bekerja. Besarnya tingkat pengangguran terbuka dalam suatu daerah dapat dihitung melalui jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja kemudian dikalikan dengan seratus persen.

Pengangguran termasuk masalah yang harus diperhatikan, karena pengangguran adalah keadaan seseorang yang tidak sedang bekerja, padahal bekerja itu penting untuk mendapatkan imbalan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Keharusan seseorang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan yang telah dikerjakansudah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105:¹²

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 203

Artinya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105 menyebutkan bahwa keharusan seseorang untuk bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai-santai tanpa ada suatu pekerjaan. Seseorang yang sibuk dengan bekerja berarti tidak ada waktu untuk menganggur, karena dengan menganggurnya seseorang akan membuang-buang waktu saja. Menganggur menyebabkan seseorang tidak mendapatkan imbalan, sehingga tidak ada pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105 mengandung makna bahwa setiap orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah. Upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga seseorang dapat hidup dengan layak.

Hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan menjadi sangat penting di berbagai daerah, karena dengan adanya langkah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu strategi yang dilakukan guna menurunkan kemiskinan.¹³ Penelitian Putra dan Arka yang membahas tentang kemiskinan menunjukkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda membuktikan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengaruh yang positif berarti turunnya tingkat pengangguran terbuka

¹³ Achmad Zaini, *Pengembangan Sektor Unggulan di Kalimantan Timur*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hal. 117

yang akan diikuti dengan turunnya tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya.¹⁴

Pengangguran menyebabkan kemiskinan, karena pengangguran tidak mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang menganggur tidak mendapatkan upah, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 yang memiliki makna bahwa menganggur menyebabkan seseorang tidak mendapatkan imbalan atau upah. Besar kecilnya upah dapat mempengaruhi kemiskinan. Berkaitan dengan besar kecilnya upah, maka yang perlu ditekankan untuk sekarang ini adalah besarnya upah minimum yang ditetapkan disuatu daerah. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang diberikan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Penetapan terkait dengan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan upah layak terhadap pekerja dan buruh agar tidak terjadi lagi eksploitasi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan standar daerahnya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Upah minimum yang diberikan kepada daerah yang memiliki kelemahan dari segi proburuhnya merupakan langkah utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah

¹⁴ I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 7, No. 3, Maret 2018, hal. 416

untuk mengurangi kemiskinan.¹⁵ Upah minimum dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan.

Upah minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan standar hidup minimum di daerah dimana pekerja menempati yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan untuk pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar hidup minimum dan dapat menjadikan pekerja untuk dapat hidup layak. Harapan dari pemberian upah minimum adalah kebutuhan hidup dari para pekerja menjadi terjamin karena telah sesuai dengan standar hidup pada daerah yang ditempati pekerja. Kebutuhan hidup dari masyarakat apabila dapat terpenuhi, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi masalah kemiskinan.

Hubungan antara upah minimum dengan kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam perekonomian, karena dengan adanya upah minimum yang semakin meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Penelitian Putri dan Yuliarmi tentang kemiskinan menunjukkan bahwa hasil dari pengujiannya dengan menggunakan regresi linear berganda membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pengaruh yang negatif berarti kenaikan upah

¹⁵ Ward Berenschot dan Gerry Van Klinken, *Citizenship in Indonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hal. 180

minimum akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Bali, begitupun sebaliknya.¹⁶

Kemiskinan dapat diukur melalui beberapa aspek. Indeks Pembangunan manusia adalah salah satu aspek yang digunakan dalam mengukur angka kemiskinan.¹⁷ Indeks merupakan manusia merupakan tolok ukur dalam kualitas sumber daya manusia. Tingginya indeks pembangunan dapat mengelola faktor-faktor produksi dengan baik, sehingga indeks pembangunan manusia yang tinggi maka menyebabkan produktivitas tenaga kerja semakin tinggi. Kualitas dari pembangunan manusia yang diukur melalui indeks pembangunan manusia dapat menentukan tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga pembangunan manusia dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kesejahteraan.

Pembangunan manusia menurut Ginting dalam penelitian Andykha menjelaskan bahwa pembangunan manusia di Indonesia lebih cenderung ke pengurangan kemiskinan. Investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan lebih mempunyai dampak terhadap penduduk miskin, jika dibandingkan dengan penduduk tidak miskin. Ketersediaan fasilitas dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang cenderung murah dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.¹⁸ Pentingnya kualitas pembangunan manusia

¹⁶ I. A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali", *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2013, hal. 445

¹⁷ Henry J.D Tambotot dan Allen A. Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*, (Malang: Seribu Bintang, 2019), hal. 38

¹⁸ Rydho Andykha, dkk, "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IP Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 33, No. 2, Juli 2018, hal. 115

mempunyai pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif berarti kenaikan indeks pembangunan manusia akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.²⁰

Indeks pembangunan manusia adalah salah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, akan tetapi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan, yaitu kepadatan penduduk. Kemiskinan dapat diatasi dengan cara mengurangi kepadatan penduduk, contohnya adalah adanya program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang telah menyebabkan kemiskinan.²¹ Kepadatan penduduk merupakan cara yang digunakan untuk melihat persebaran penduduk dalam suatu wilayah. Persebaran penduduk yang tidak merata akan menyebabkan pembangunan yang tidak merata, karena terjadinya kesenjangan antar wilayah yang pada akhirnya akan mengarah pada kemiskinan.

Persebaran penduduk yang tidak merata dapat memicu terjadinya kemiskinan.²² Persebaran penduduk yang tidak merata akan menyebabkan keadaan kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam pada wilayah yang penduduknya jarang, sedangkan pada wilayah yang penduduknya padat memiliki kelebihan sumber daya manusia yang akan menyebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan penduduk karena melebihi daya dukungnya.

²⁰ Rydho Andykha, dkk, "Analisis Pengaruh PDRB . . . hal. 120

²¹ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 124

²² Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal 156

Sumber daya manusia yang tersedia berhubungan dengan daya dukung suatu lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kehidupan manusia, salah satunya adalah berkaitan dengan manusia dan sumber daya dukungnya berupa sumber daya alam yaitu menjelaskan tentang tugas manusia diturunkan di bumi sebagai seorang khalifah atau pemimpin, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30:²³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Manusia sebagai pemimpin di bumi mempunyai kewajiban yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 6

bumi, akan tetapi dilarang untuk merusak sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya dukung kehidupan manusia haruslah terdapat keseimbangan antara sumber daya manusia dengan daya dukungnya. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah harus sesuai dengan daya dukung yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Jumlah penduduk yang ada dalam beberapa wilayah menandakan seberapa besar persebaran penduduk.

Persebaran penduduk pada masing-masing wilayah yang ditandai dengan kepadatan penduduk dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, Yasin, dan Rahmawati menunjukkan hasil bahwa kepadatan berpengaruh terhadap kemiskinan bersifat lokal, salah satunya adalah di Kabupaten Cilacap. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya kenaikan kepadatan penduduk akan menyebabkan kemiskinan menjadi bertambah.²⁴

Kepadatan penduduk adalah salah satu faktor dari kemiskinan, karena terdapat kaitannya antara penduduk dengan daya dukungnya. Faktor lain yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi perubahan keadaan perekonomian dalam suatu daerah secara keseluruhan yang dilihat dari periode ke periode

²⁴ Rifki Adi Pamungkas, dkk, "Perbandingan Model GWR dengan *Fixed Adaptive Bandwidth* Untuk Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah", *Jurnal Gaussian*, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 544

berikutnya untuk keadaan yang lebih baik.²⁵ Terjadinya peningkatan barang dan jasa yang diproduksi disebabkan oleh adanya perkembangan perekonomian dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat suatu daerah untuk memajukan daerahnya dalam hal ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya, meskipun untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai permasalahan makro ekonomi jangka panjang, dikarenakan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka dapat menggambarkan adanya kesejahteraan dari faktor produksi yang dapat diikuti dengan tercapainya kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan faktor produksi. Keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh adanya faktor produksi. Faktor produksi yang dimaksud adalah bahan baku yang berasal dari alam dan manusia sebagai pengelola. Manusia sebagai salah satu faktor produksi dan sebagai pengelola kekayaan alam disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hud ayat 61:²⁶

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿٦١﴾

Artinya:

Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain

²⁵ Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 23

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 228

Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)''.

Al-Qur'an Surat Al-Hud ayat 61 menjelaskan bahwa manusia hidup di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi. Arti kata pemakmuran bumi mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi yaitu berupa adanya penggunaan sumber daya yang ada di bumi yang efisien dan perkembangan dari faktor produksi dapat memberikan kesejahteraan. Pemakmuran bumi berarti adanya aktivitas yang menyeluruh dalam bidang produksi sehingga meningkatkan output selanjutnya. Tujuan dari pemakmuran bumi kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi adalah lebih bersifat menyeluruh yaitu mengarah kepada kesejahteraan dan kesejahteraan akhirat.

Pertumbuhan ekonomi dalam teorinya beberapa ahli seperti Schumpeter menyebutkan bahwa jiwa usaha adalah faktor yang menentukan kemajuan ekonomi. Jiwa usaha yang merupakan pemilik modal berani menghadapi resiko untuk membuka usaha baru dan melihat peluang usaha serta harus dapat memperluas usaha yang telah dirilisnya.²⁷ Lapangan usaha inilah yang nantinya dapat mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dengan kemiskinan, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka

²⁷ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 55

dapat menurunkan kemiskinan.²⁸ Penelitian Putri dan Yuliarmi tentang kemiskinan menunjukkan bahwa hasil dari pengujiannya dengan menggunakan regresi linear berganda membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pengaruh yang negatif berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Bali, begitupun sebaliknya.²⁹

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor kemiskinan, karena pemerintah menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur perkembangan perekonomian, sedangkan pemerintah untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan salah satunya adalah melalui pendapatan yang diterima oleh pemerintah pada masing-masing daerah, sehingga pendapatan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kemiskinan. Todaro dalam penelitian Mustamin, Agussalim, dan Nurbayani menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya adalah pendapatan rata-rata daerah, pendapatan yang semakin tinggi maka potensi dalam pengalokasian pendapatan guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar.³⁰

Pendapatan dapat menyebabkan kemiskinan, karena masyarakat dalam struktur sosialnya tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang disediakan untuk masyarakat dan kurangnya strategi pemerintah daerah di

²⁸ Wahyu Hidayat, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*, (Malang: UMM Press, 2017), hal. 151

²⁹ A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Beberapa Faktor yang . . . hal. 445

³⁰ Siti Wilda, dkk, "Pengaruh Variabel Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Analisis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hal. 166

bidang pendanaan pembangunan yang menyebabkan belum berhasilnya kebijakan pemerintah dapat menyebabkan kemiskinan.³¹ Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sumber keuangan daerah sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi pada zaman dahulu sumber pendapatan berbeda dengan sekarang, salah satu sumber pendapatan pada zaman dahulu adalah harta rampasan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7.³²

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya:

Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan bahwa pendapatan dalam negara pada zaman dahulu berasal dari harta rampasan perang, kemudian harta rampasan perang diberikan untuk kepentingan rakyat atau

³¹ Rabina Yunus, dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hal. 55

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 546

negara salah satunya adalah untuk orang-orang miskin.³³ Pendapatan pemerintah suatu daerah yang didapat dari sumber keuangan daerah diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

Pendapatan daerah dari sumber keuangan daerah yang diperoleh masyarakat bertujuan untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dengan cara pengentasan kemiskinan. Penelitian Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika, tentang kemiskinan menunjukkan hasil bahwa pendapatan pemerintah daerah, seperti pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah mempunyai pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Pendapatan pemerintah daerah tersebut berarti semakin tinggi pendapatan yang diterima maka akan menurunkan kemiskinan, begitupun sebaliknya.³⁴

Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan, karena kemiskinan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat dan kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kemiskinan dapat dilihat dari segi regional yang ada di provinsi maupun secara spasial pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yang terdapat di suatu provinsi. Permasalahan kemiskinan seperti yang telah dijelaskan, maka peneliti akan menguji dan menganalisis masalah kemiskinan ini dengan judul “**Faktor-Faktor yang**

³³ Ruslan, *Ayat-Ayat Ekonomi: Makna Global dan Komentar*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hal. 45

³⁴ Agung Ridwan, dkk, “Pengaruh Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan (Studi di Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi)”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, Juli-desember 2017, hal 97-99

Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Secara Regional dan Spasial di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang menjadi permasalahan utama yang disebabkan oleh banyak faktor serta fokus pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan guna mengentaskan kemiskinan adalah salah satu langkah yang utama.
2. Tenaga kerja merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, karena terbatasnya ketiadaan lapangan pekerjaan, sehingga akan berakibat pada persaingan untuk merebutkan posisi tenaga kerja yang terserap berdasarkan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang belum terserap akibatnya tidak mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga harus berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan yang lain.
3. Pengangguran dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima masyarakat dan dapat mempengaruhi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sehingga perlunya upaya untuk meminimalisir tingkat pengangguran terbuka.
4. Upah minimum dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami kenaikan merupakan kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan pro kontra bagi pekerja selaku penerima upah dan perusahaan selaku pemberi upah.

5. Indeks pembangunan manusia merupakan modal utama dalam aktivitas ekonomi, karena dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi mampu untuk meningkatkan produktivitas yang dilakukan oleh manusia dan produktivitas akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena sumber daya manusia merupakan salah satu dari faktor ekonomi.
6. Kepadatan penduduk merupakan permasalahan yang muncul karena persebaran dari penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata akan menyebabkan kegiatan ekonomi hanya terpusat pada daerah atau wilayah tertentu saja, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.
7. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam keberhasilan suatu ekonomi. Ekonomi yang baik dicirikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dalam memperhatikan kemiskinan harus diperhatikan pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah.
8. Modal utama pada keuangan daerah adalah pendapatan daerah, karena pendapatan daerah nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh tenaga terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
3. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
4. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
5. Apakah terdapat pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
6. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
7. Apakah terdapat pengaruh pendapatan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
8. Apakah secara serentak terdapat pengaruh tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
9. Secara spasial, apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
10. Bagaimana perbandingan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan dari segi regional dan spasial?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
4. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
5. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
7. Menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
8. Menganalisis pengaruh tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah secara serentak terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

9. Menganalisis secara spasial variabel bebas yang berpengaruh terhadap kemiskinan pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
10. Menganalisis perbandingan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan dari segi regional dan spasial.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kemiskinan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori dan tambahan pengetahuan serta membuktikan teori ekonomi yang sudah pernah ada dan sudah pernah diuji sebelumnya berkaitan dengan kemiskinan secara regional maupun secara spasial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam masalah perekonomian, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan yang mengarah pada kemiskinan utamanya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah secara regional maupun spasial.
 - b. Memberikan gambaran kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan ekonomi di sekitar masyarakat dan yang mengarah pada permasalahan yang terjadi di daerahnya beserta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kemiskinan di suatu daerah secara regional maupun spasial.

- c. Dapat dijadikan dasar acuan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini meskipun ada perbedaan daerah yang menjadi sasaran penelitian.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis permasalahan ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian ini, khususnya kemiskinan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang diangkat dalam penelitian ini secara regional di Provinsi Jawa Timur dan secara spasial pada masing-masing kabupaten atau kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai daerah yang dijadikan untuk penelitian, karena pada Provinsi Jawa Timurmiliki sebaran penduduk yang beraneka ragam, sehingga dapat menimbulkan perbedaan kondisi perekonomian dan permasalahan perekonomian. Salah satu permasalahan yang muncul dalam perekonomian di Provinsi Jawa Timur adalah kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Pembatasan masalah dalam hal variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian ini menjadi perlu, agar penelitian ini dapat lebih terarah

dan guna mengantisipasi agar pembahasan masalah tidak berlebihan. Variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Kemiskinan: Kemiskinan secara umum merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵
- b. Tenaga kerja: pekerja atau karyawan yang mempunyai rata-rata bekerja perhari.³⁶ Bekerja dilakukan dengan cara melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan.³⁷
- c. Tingkat pengangguran terbuka: persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.³⁸
- d. Upah minimum: upah bulanan terendah yang meliputi upah pokok termasuk tunjangan tetap yang bertujuan pemenuhan kebutuhan hidup berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak.³⁹

³⁵ Mohammad Rokib, *Teologi Bencana: Studi . . .* hal. 92

³⁶<https://jatim.bps.go.id/subject/9/industri.html#subjectViewTab1> (diakses pada Senin, 20-04-2020, pukul 20.35 WIB)

³⁷<https://jatim.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjectViewTab1> (diakses pada Senin, 20-04-2020, pukul 20.41 WIB)

³⁸*Ibid.*,

³⁹ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif – Bonus – THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiunan – Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 57

- e. Indeks pembangunan manusia: indikator capaian pembangunan manusia yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli).⁴⁰
- f. Kepadatan penduduk: rasio jumlah penduduk per kilometer persegi.⁴¹
- g. Pertumbuhan ekonomi: suatu proses perubahan yang ada disuatu negara berkaitan dengan kondisi perekonomian dengan keadaan yang lebih baik secara berkesinambungan selama periode tertentu.⁴²
- h. Pendapatan daerah: semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 1 poin 35 UU No. 23 Tahun 2014)⁴³

2. Definisi Operasional

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk dapat hidup layak. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang terserap untuk dipekerjakan pada suatu tempat salah satunya adalah tenaga kerja yang terserap di bidang industri agar mendapatkan upah atas apa yang telah dilakukannya. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan standar hidup minimal.

⁴⁰ M. Suparmoko dan Furtasan Ali Yusuf, *Perekonomian Indonesia Edisi 2*, (Bogor: In Media, 2014), hal. 293

⁴¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020*, (Publikasi BPS Provinsi Jawa Timur pada 28 Februari 2020), hal. 36

⁴² Ali Ibrahim Hisyam, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 231

⁴³ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, (Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2015), hal.12

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan dalam kualitas hidup manusia. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah laju produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha. Pendapatan daerah adalah perhitungan banyaknya pendapatan yang diterima oleh suatu daerah dari sumber keuangannya atau sumber-sumber pendapatannya.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi kuantitatif sangatlah lengkap dengan penyajian materi didalamnya, dengan demikian perlunya sistematika penyusunan skripsi kuantitatif untuk mempermudah para pembaca untuk memahami dengan tepat dan untuk mempermudah para pembaca menemukan setiap bagian yang dicarinya. Sistematika penulisan skripsi kuantitatif dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian awal

Bagian awal, berisi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

2. Bagian utama

a. Bab I

Bab I Pendahuluan, berisi: (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) kegunaan

penelitian, (6) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (7) penegasan istilah, (8) sistematika skripsi.

b. Bab II

Bab II Kajian Pustaka, berisi: (1) teori yang menjelaskan variabel atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, (2) penelitian terdahulu, (3) kerangka konseptual, (4) hipotesis penelitian.

c. Bab III

Bab III Metode Penelitian, berisi: (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (3) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (4) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (5) analisis data.

d. Bab IV

Bab IV Hasil Penelitian, berisi: (1) hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pengujian hipotesis, (2) temuan penelitian.

e. Bab V

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan hasil penelitian.

f. Bab VI

Bab VI Penutup, berisi: (1) kesimpulan, (2) saran

3. Bagian akhir

Bagian akhir, berisi: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.